

PENTINGNYA KEMAMPUAN MANAJERIAL APARAT PEMRINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (Suatu Studi di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat)

REIGEN KATIHOKANG

Abstrak

Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan pembangunan desa dibutuhkan kemampuan manajerial aparat pemerintah desa yang handal dalam usaha memberikan kepuasan bagi masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan desa sesuai tujuan keberadaan institusi pemerintahan sebagai organisasi publik.

Dalam penelitian ini dapat diketahui kapasitas atau kemampuan aparat pemerintah di desa Teep Kecamatan Amurang Barat yang pada umumnya berjalan dengan baik.

Key words :Manajerial, Aparat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada wilayah pedesaan, dituntut keterlibatan sosiokultural yang ada dalam masyarakat. Hal ini semakin membuka peluang bagi masyarakat desa untuk memanfaatkan nilai-nilai budaya serta pranata sosial setempat demi mewujudkan keberhasilan pembangunan di desanya masing-masing. Melalui otonomi desa, terbuka kesempatan yang luas untuk mengetahui sumber daya, masalah, kendala serta memperbesar akses setiap warga desa untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya, atau sebaliknya bagi pemimpin dapat mengetahui kebutuhan desa secara tepat. Dengan demikian pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat serta untuk masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan yang layak.

Hal menonjol dilihat dari aspek pemerintahan adalah pelaksanaan organisasi pemerintahan desa yang belum secara optimal berjalan dengan baik, sehingga pertumbuhan dan perubahan sosial di desa relatif lambat.

Untuk mencapai hasil maksimal pembangunan, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga selesainya pembangunan, yang kata kuncinya diperlukan pengelolaan secara sistematis. Dalam konteks ini, sistem manajemen pemerintahan sebagai perangkat integral dan melekat dengan pengelolaan pembangunan desa berfungsi untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan itu, aspek kemampuan aparat pemerintahan desa sebagai penentu dan penyelenggara manajemen pemerintahan desa harus dapat menciptakan nilai keadilan dalam proses pembangunan desa. Nilai keadilan itu berkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga negara yang harus terlayani secara menyeluruh oleh pemerintah desa.

Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan pembangunan desa dibutuhkan kemampuan manajerial aparat pemerintah desa yang handal dalam usaha memberikan kepuasan bagi masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan desa sesuai tujuan keberadaan institusi pemerintahan sebagai organisasi publik.

Fenomena di atas menguatkan asumsi bahwa kemampuan manajerial aparat pemerintah desa dalam mengelola manajemen pemerintahan desa masih sangat rendah, bahkan aktivitas manajemen tidak dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa. Kondisi ini, dapat menyebabkan kualitas pengelolaan manajemen pemerintah desa yang menunjang keberhasilan pembangunan desa menjadi rendah. Padahal pembangunan desa yang merupakan keterpaduan antar berbagai kebijakan pemerintah dengan partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat, perlu didukung dengan kemampuan aparatur pemerintah dalam menciptakan iklim keterpaduan yang serasi dan berkesinambungan dalam memanfaatkan segala sumber daya di desa untuk didayagunakan dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Atas dasar kondisi objektif di atas, salah satu kunci keberhasilan organisasi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa, terletak pada kemampuan manajerial aparat pemerintah desa. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang

pentingnya kemampuan manajerial aparat pemerintah desa dengan pembangunan desa di desa Teep Kecamatan Amurang Barat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi masalah pokok penelitian ini adalah "masih kurangnya kemampuan manajerial aparat pemerintahan desa dalam pembangunan desa Teep Kecamatan Amurang Barat.

Oleh karena itu maka penelitian ini akan berusaha menjawab suatu pertanyaan, yaitu: "Bagaimana kapasitas manajerial aparat pemerintahan desa dalam pembangunan desa di desa Teep Kecamatan Amurang Barat?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kapasitas manajerial aparat pemerintah desa dalam pembangunan desa di desa Teep Kecamatan Amurang Barat

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara teoritis atau secara praktis diharapkan dapat memberikan nilai positif terhadap ruang lingkup antara lain :

- a. Melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara komperhensif terhadap dunia pengetahuan khususnya para insan akademik maupun masyarakat pada umumnya.
- b. Lebih praktisnya penelitian ini diharapkan secara langsung dapat menyentuh pemerintah khususnya di desa yang berhubungan dengan pentingnya kemampuan manajerial aparat pemerintah dalam pembangunan desa.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Manajemen Pemerintahan

Secara umum manajemen pemerintahan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor dan sumber daya sesuai perencanaan (planning) hingga evaluasi yang diperlukan

untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Sebagaimana manajemen yang dipraktekkan di sektor swasta, maka manajemen pemerintahan ditempatkan pada posisi yang sama, yakni harus memiliki orientasi kepada siapa jasa publik itu diberikan.

Dalam manajemen pemerintahan dikenal tiga aktor, yaitu pelanggan, produser dan pengatur pelayanan (*service arranger*). Apabila produser merangkap sebagai pengatur, maka produser selain memproduksi juga memasarkan dan mendistribusi jasa kepada pelanggan dan pelanggan secara langsung menerima pelayanan dari produser (pemerintah).

Sejalan dengan itu, Ndraha (1997:73-86) berpendapat bahwa pemerintah berfungsi sebagai pembuat, penjual dan distributor, sementara rakyat adalah pemesan, pembeli, penerima produk-produk pemerintahan. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah pada situasi seperti ini diibaratkan hubungan produser dengan konsumen dan disebut hubungan transaksional maupun transformasional.

B. Kapasitas Manajerial Aparat Pemerintahan Desa

Kapasitas manajerial secara umum merupakan kemampuan manajer suatu organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Millet (dalam Todaro, 1998), mengatakan seorang manajer harus memiliki empat kemampuan pokok dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu: (a) the ability to see an enterprise *as a whole*; (b) the ability to make decisions; (c) the ability to delegate authority; dan (d) the ability to command loyalty.

Seorang mlanajer harus mampu melihat organisasi sebagai satu keseluruhan (*the ability to see an enterprise as awhole*).Maksudnya, manajer dengan segala pengetahuan yang dimilikinya, harus dapat memandang seluruh unsur yang ada dalam organisasi sebagai satu kesatuan, serta dapat mempersatukan komponen organisasi atau individu-individu yang ada dan yang berpotensi bersama-samla bekerja untuk tujuan organisasi. Seorang manajer harus mampu mengambil keputusan-keputusan (*the ability to make decisions*) guna mengatasi segala permasalahan yang timbul, dengan demikian ia dapat membuat alternatif-alternatif dan selanjutnya memillh alternatif yang terbaik guna memecahkan permasalahan yang dihadapi.

C. Konsep Pembangunan Desa

Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata "bangun", diberi awalan "pem" dan akhiran "an", guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun setidaknya mengandung empat arti. Pertama, dalam arti sadar atau siuman. Kedua, dalam arti bangkit atau berdiri. Ketiga, dalam arti bentuk. Keempat, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan meliputi pula segi anatomik (bentuk), fisiologik (kehidupan) dan behavioral (perilaku) (Ndraha, 1987:1).

Pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1987:2), adalah "usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap". Menurut Siagian (1988:31), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar (Sugiyono, 2005:15).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian sosial yang berusaha mendekati kenyataan sosial secara empirik dari dalam sebagai rangkaian proses sosial yang saling membentuk kenyataan dengan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata, gambaran dan catatan dalam tampilan yang apa adanya.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam hal ini adalah, pertama, kemampuan manajerial aparat pemerintahan desa yang didefinisikan dengan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, sehingga dapat melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memiliki kepekaan terhadap pandangan maupun aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Indikator kemampuan manajerial aparat pemerintahan desa Teep ini dikaji melalui:

- (1) kemampuan pengelolaan struktur organisasi,
- (2) kemampuan memperoleh dukungan lingkungan,
- (3) kemampuan pelaksanaan tugas (performance), dan
- (4) kemampuan kepemimpinan (leadership).

Fokus Penelitian kedua, ialah pembangunan desa yang didefinisikan sebagai proses kerjasama pemerintah dengan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kelihood sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat desa. Indikatornya adalah,

- (1) partisipasi masyarakat,
- (2) perimbangan peran masyarakat dan pemerintah,
- (3) kemandirian masyarakat, dan
- (4) taraf hidup masyarakat

C. Jenis dan Informan Penelitian

Jenis data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi maupun perpustakaan.

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil diperoleh dari menghitung atau mengukur kualitas maupun kuantitas dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap (Sudjana 1975 :5) adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah desa di desa Teep Kecamatan Amurang Barat.

Adapun sampel yang ditetapkan secara *purposive* sebagai informan yang diwawancarai yaitu terdiri dari kepala desa, Ketua BPD, 4 perangkat desa, dan 3 tokoh masyarakat dan 6 masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif maka instrumen penelitian yang utama adalah penelitian sendiri disamping itu demi mencapai keakuratan data maka digunakan kuisisioner atau daftar pertanyaan.

Kemudian dalam proses atau teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- b. Wawancara mendalam (*indephtinterview*). Dilakukan untuk mendapatkan data dari *key informan* yang dirasa mengerti dan mengetahui kondisi *real* dilokasi penelitian tentang pentingnya kemampuan manajerial aparatur Pemerintah desa dalam pembangunan desa. Key informan tersebut diambil penulis secara *purposive*. Adapun key informan diantaranya adalah: Kepala Desa, Ketua BPD

Wawancara mendalam ini dimaksudkan akan memperkuat informasi yang didapatkan lebih objekif, mendalam dan terpercaya.

- c. Untuk lebih mengakuratkan data-dta penelitian, penulis juga menggunakan beberapa langkah dalam penelitian ini yaitu :
 - 1) Melakukan observasi di lokasi penelitian. Observasi adalh cara mengumpulkan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan, terhadap objek yang akan diteliti. Jadi dalam penelitian ini penulis terjun langsung di lokasi penelitian.
 - 2) Studi Kepustakaan. Dalam memperoleh data-data yng mendukung dalam rangka menjadikan penulisan ini mempunyai landasan teoritis, maka penulis juga melakukan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi kepustakaan.

E. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa data yang berifat deskriptif, dimana suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas fakta-fakta berdasarkan data yang terkumpul di lapangan yang berkaitan erat dengan objek

penelitian, kemudian data tersebut dipadukan dan dianalisa secara kualitatif dengan memberikan gambaran-gambaran, interpretasi atau penafsiran atau fakta-fakta tersebut.

Menurut Nawawi, penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (1994:73).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut :

- a. Kategorisasi, dalam hal ini data-data yang diperoleh dari lapangan di kategorisasikan berdasarkan data prioritas yang dianalisa dan data yang tidak diprioritaskan untuk dianalisa.
- b. Reduksi, adalah sebuah langkah dengan menghilangkan atau menegasikan data tertentu yang dinilai tidak perlu untuk dianalisa secara lebih lanjut untuk kepentingan penelitian.
- c. Interpretasi, adalah tahapan akhir dari proses analisa data, dimana pada tahap ini penulis memberikan tafsiran dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan erat dengan data-data yang menjadi isu dalam penelitian ini.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kemampuan Manajerial Aparat Pemerintah Desa

a. Kemampuan Pengelolaan Struktur Organisasi

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pola hubungan dan kerjasama antara Hukum Tua dengan perangkat-perangkat harus berjalan sebaik mungkin Hubungan kerjasama ini tercermin melalui interaksi dan komunikasi yang lancar sehingga inenimbulkan sinergitas dan saling memahami antara seluruh komponen.Keadaan demikian sangat mendukung berlangsungnya kegiatan pemerintahan sebagaimana direncanakan untuk inewujudkan visi, misi, dan tujuan.

Salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan aparat pemerintahan desa adalah kemampuan dalam pengelolaan struktur

organisasi. Pengelolaan struktur organisasi adalah tata pergaulan, interaksi dan kerjasama antara Hukum Tua dengan perangkat-perangkatnya dalam melaksanakan roda pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan diketahui bahwa hubungan ketjasama antara Hukum Tua dengan perangkat-perangkatnya umumnya cukup baik, hal ini berdasarkan pernyataan dari Bapak FP seorang perangkat desa Teep Kecamatan Amurang Barat, beliau mengatakan: *hubungan antara Hukum tua dengan kami sebagai perangkat desa sejauh ini saya rasa berjalan dengan baik, hampir tidak ada konflik selama beliau menjabat, kami sebagai bawahan harus loyal kepada atasa kami. Dan sejauh ini beliau juga sangat menghargai kami sebagai bawahannya.*

Dari hasil-hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan manajerial aparat pemerintah desa di desa Teep Kecamatan Amurang Barat di bidang pengelolaan struktur organisasi sudah baik.

b. Kemampuan Memperoleh Dukungan Lingkungan

Kegiatan diskusi, terutama yang berkaitan dengan penemuan dan pencarian solusi masalah pembangunan di tingkat desa cukup inters dilakukan. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator terciptanya dukungan kondusif dari segenap SDM bagi Hukum Tua dan perangkat-perangkatnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan data penelitian, para informan pada umumnya menjawab kegiatan diskusi cukup sering dilakukan hal itu berdasarkan pernyataan dari informan masyarakat desa Teep sekaligus juga Tokoh masyarakat di desa Teep Kecamatan Amurang barat yakni Bapak JL, beliau mengatakan : *pada umumnya setiap pemerintahan termasuk desa mempunyai masalah yang hampir sama seperti kerja bakti, pembangunan balai pertemuan, pembangunan kantor desa, jalan dan lain-lain, begitu juga di desa Teep memang masih sering menemui kendala, untuk mengatasi hal tersebut perlu ada koordinasi oleh aparat desa dengan masyarakat melalui forum terbuka atau pertemuan-pertemuan untuk mendiskusikannya, di desa diskusi-diskusi untuk pemecahan masalah sering dilakukan pemerintah desa. Hal ini untuk meningkatkan pembangunan, apalagi sekarang desa teep sedang membangun tempat pertemuan masyarakat.*

c. Kemampuan Pelaksanaan Tugas (Performance)

Seorang aparatur pemerintahan dituntut memiliki kemauan dan kesadaran yang tinggi untuk memajukan lembaga dimana dia bekerja. Upaya untuk memajukan lembaga itu salah satunya dapat diwujudkan melalui kerja keras dan bertanggungjawab dalam setiap tugas yang diamanatkan kepadanya. Kerja keras dan sikap bertanggungjawab itu merupakan cerminan dari perilaku seseorang dalam bekerja, yang bermula dari kesediaan dan kesadarannya untuk mentaati semua peraturan dan norma-norma yang ditetapkan oleh lembaga.

Berdasarkan temuan penelitian, Hukum Tua dan perangkat-perangkatnya melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. Sikap bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas, umumnya cukup tinggi, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ketua BPD Desa Teep beliau mengatakan *menurut penilaian saya dalam melaksanakan tugasnya Hukum Tua dan Perangkat-perangkatnya menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.*

Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, penulis mewawancarai informan dari masyarakat yakni Bapak KR, beliau mengatakan : *Hukum Tua dan perangkatnya selama ini bekerja dengan baik, terutama dalam melayani masyarakat, mereka menjalankannya dengan tanggung jawab, seperti dalam membantu masyarakat membuat surat-surat, bahkan dalam bidang pembangunan selalu ada pertanggung jawaban dari Hukum tua baik tertulis maupun lisan.*

Untuk mengetahui apakah seseorang memiliki prestasi dalam bekerja dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satu metode yang mudah untuk melihat seseorang berprestasi dalam bekerja adalah dengan melihat kecakapan dan kemampuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang diembankan kepadanya. Instrumen penilaian kinerja karyawan antara lain apakah seorang aparatur pemerintahan desa bekerja secara baik, efisien, efektif dan produktif sesuai dengan tujuan lembaga.

Berdasarkan jawaban informan, hasil kerja mereka secara umum disenangi oleh masyarakat sehingga memotivasi mereka bekerja lebih baik di

masa mendatang.

d. Kemampuan Kepemimpinan (Leadership)

Kompetisi global yang semakin tajam, mendorong organisasi atau lembaga pemerintahan secara kontiniu perlu nienyempurnakan berbagai strategi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Salah satu upaya untuk nieningkatkan kualitas itu adalah dengan meniperhatikan aspek leadership, yakni kemampuan mempengaruhi dan mempersuasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang program penibangunan desa. Pentingnya pemeliharaan kualitas leadership ini antara lain untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja (quality of work life) yang lebih baik. Dalam waktu yang sama perlu ditumbuhkan hubungan yang serasi dan harmonis antara aparatur pemerintahan desa dengan masyarakat desa yang dipimpinnya demi kepentingan bersama dalam memajukan sendi-sendi kehidupan masyarakat desa.

Di lingkungan pemerintahan desa Teep Kecamatan Amurang Barat, pembagian hak maupun kewajiban dilakukan secara distributif dan merata, sehingga tidak menimbulkan diskrimisasi dan gap antara sesama aparat pemerintahan desa. Prinsip keadilan kerja dalam hal ini dapat dilihat dari jawaban informan. Bapak YR seorang aparat pemerintah desa menuturkan: *Hukum Tua dalam pembagian hak dan kewajiban bagi kami sebagai bawahan dapat dikatakan baik, Hukum tua tidak bersifat diskriminasi dalam membagi tugas, hak dan kewajiban dari pegawainya.*

Selain beban kerja, suasana kerja juga dapat mempengaruhi kepuasan seseorang dalam bekerja. Suasana kerja yang harmonis, rileks dan bebas dari konflik merupakan salah satu upaya menciptakan kepuasan kerja di kalangan aparatur pemerintahan desa. Hukum Tua harus mampu menciptakan kepemimpinan yang sejuk sehingga membawa suasana kerja yang kondusif serta menghindarkan konflik di lingkungan aparatnya.

B. Tingkat Pembangunan Desa

Pembangunan desa dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai proses kerjasama pemerintah dengan masyarakat untuk memperbaiki dan

meningkatkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat desa. Indikator ini diukur melalui (1) partisipasi masyarakat, (2) perimbangan peran masyarakat dan pemerintah, (3) kemandirian masyarakat, dan (4) taraf hidup masyarakat.

a. Partisipasi masyarakat

Secara institusional, Hukum Tua dan perangkat-perangkatnya patut memperhatikan dan memberikan arahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi luas dalam melaksanakan program-program pembangunan di tingkat desa. Misalnya, memfasilitasi dan memberikan kesempatan bagi semua masyarakat untuk memberi saran, pendapat, ikut aktif mengambil peran dalam setiap kegiatan proyek pembangunan. Selain itu, Hukum Tua dan perangkat-perangkatnya harus dapat menumbuhkan usulan dan arah pembangunan desa yang bersumber dari masyarakat sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang mendesak.

Berdasarkan temuan penelitian, informan menjawab bahwa peluang masyarakat untuk ikut andil dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa umumnya cukup terbuka, hal ini berdasarkan pernyataan dari seorang tokoh masyarakat desa Teep Bapak KP, beliau mengatakan : *Peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa Teep sangat terbuka bahkan partisipasi masyarakat di desa sangat dibutuhkan oleh pihak pemerintah.*

Berdasarkan hasil penelitian, setiap anggota masyarakat cukup tinggi berpartisipasi mengambil peran melaksanakan program pembangunan desa, hal ini berdasarkan pernyataan dari Hukum tua desa Teep, beliau mengatakan: *masyarakat di desa Teep sangat kooperatif dalam mengambil peran setiap pelaksanaan program pembangunan desa seperti pembangunan jalan ke kebun, pembangunan balai pertemuan dan lain-lain.*

b. Perimbangan Peran Masyarakat dengan Pemerintah

Manajemen memegang peranan penting dalam pengelolaan suatu organisasi agar tercapai tujuan yang diinginkan. Setiap organisasi dewasa ini dihadapkan pada *trend revolusioner*, seperti akselerasi produk, perubahan teknologi, persaingan global, deregulasi, perubahan demografi serta kecenderungan-kecenderungan ke arah masyarakat jasa dan informasi. Trend-trend tersebut menuntut kemampuan organisasi untuk mampu

bersaing. Dalam hal inilah dituntut adanya praktek manajemen sumber daya manusia yang tangguh. Administrasi mencakup dimensi tugas sekaligus dimensi manusia. Karena itu, maka organisasi ingin berhasil maka berbagai pekerjaan organisasi harus dilaksanakan. Hal ini menuntut adanya sejumlah orang dalam organisasi yang memberikan berbagai macam tingkat kepuasan dan atas dasar itu mereka harus melakukannya agar pekerjaan terlaksana dengan baik oleh semua personil. Jadi ada interaksi fungsional dalam administrasi antara manusia, pekerjaan yang dibagi, organisasi dan kepuasan dalam mencapai tujuan individu dan tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem perimbangan peran antara masyarakat desa dengan pemerintah dalam pembangunan desa umumnya berjalan cukup baik.

c. Kemandirian masyarakat

Rasa bangga menjadi bagian dari anggota masyarakat desa karena tenaga dan kemampuannya sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam proses pembangunan merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan di lingkungan desa. Rasa bangga ini akan menciptakan tingkat kemandirian dalam memajukan desa- Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga citra, melakukan kegiatan yang berguna bagi pembangunan desa dengan segala potensi yang dimiliki, baik tenaga, pikiran maupun dana merupakan salah satu wujud kemandirian masyarakat desa dalam proses pembangunan di lingkungan desa.

Berdasarkan hasil penelitian, keaktifan masyarakat desa dalam melakukan kegiatan pembangunan desa umumnya cukup aktif, hal ini berdasarkan pernyataan dari Hukum Tua, beliau mengatakan : *peran masyarakat dalam pembangunan desa cukup aktif, seperti sekarang ini kami sedang membangun balai pertemuan umum desa, terlihat semangat dari masyarakat dalam membangunnya dengan memberikan sumbangan tenaga dan dana meskipun belum selesai 100% namun dengan semangat dan peran aktif masyarakat saya optimis gedung ini akan selesai dalam waktu dekat.*

Selanjutnya implementasi dari keaktifan melaksanakan kegiatan pembangunan desa

ini dapat dilihat dari kemauan yang tinggi dari masyarakat dalam menggerakkan dan mewujudkan tujuan pembangunan desa. Sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam pengembangan desa. Manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan pembangunan. Pengelolaan pembangunan desa didasarkan atas tujuan tertentu. Oleh karenanya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki di lingkungan desa harus mampu dikelola dan dapat dimanfaatkan pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kemampuan manajerial aparat pemerintahan desa dalam penelitian ini dikaji melalui indikator kemampuan pengelolaan struktur organisasi, kemampuan memperoleh dukungan lingkungan, kemampuan pelaksanaan tugas (performance) dan kemampuan leadership secara umum disimpulkan cukup baik.
2. Tingkat pembangunan desa dalam penelitian ini dikaji melalui adanya partisipasi masyarakat, adanya perimbangan peran pemerintahan dan masyarakat dalam pembangunan, adanya kemandirian masyarakat serta peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan disimpulkan cukup baik.

B. Saran

1. Untuk semakin meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan administrasi pembangunan desa, maka disarankan kepada seluruh Hukum Tua beserta perangkat-perangkatnya dapat meningkatkan kemampuan manajerial, terutama dalam aspek kognisi, keterampilan dan kepemimpinan yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan pelayanan pembangunan bagi masyarakat desa.
2. Untuk semakin menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses pembangunan desa, maka disarankan bagi Hukum Tua beserta seluruh perangkat-perangkat desa dapat menggali dan memahami kebutuhan masyarakat yang dirasakan

mendesak dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, edisi kelima, cetakan keduabelas.
- Desler, et.al. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga, 1995. Flipppo. *Manajemen Personalialia*. Jakarta: Erlangga, 1995.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 1991, edisi kedua, cetakan keempat.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007, cetakan kesembilan.
- Hidayat. "Strategi Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia", dalam Priyono Tjiptoherijanto, M. Yasin, Bakir Hasan dan Djunaedi
- Hadisumarto (eds.), *Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1982.
- Koentjaraningrat_ *Masalah Kesukuan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.
- Mangkunegara, A.A. Prabu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Moekijat. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Mubyarto. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Ndraha, Taliziduhu. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan, 2000.
- *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- *Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa di Berbagai Desa*, Yogyakarta: P3PK, 1981.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Desa.

Sarwoto. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991, cetakan kedelapan.

Siagian, Sodang P. Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi. Jakarta: Gunung Agung, 1985.

----- Manajemen Stratejik. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Simamora, Henry. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE TKPN, 1995.

Soetrisno, Loekman. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius, 1995

Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, 1998, cetakan kelima.

Tjokroamidjojo, Bintoro. Pengantar Administrasi Penibangunan. Jakarta: LP3ES, 1987.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah